



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

IKHTISAR MINGGUAN COVID-19 DI INDONESIA

Edisi 9

Periode 19 September 2021

Koordinator : Badan Litbangkes

Penyusun : Badan Litbangkes, Pusdatin, Paskhas

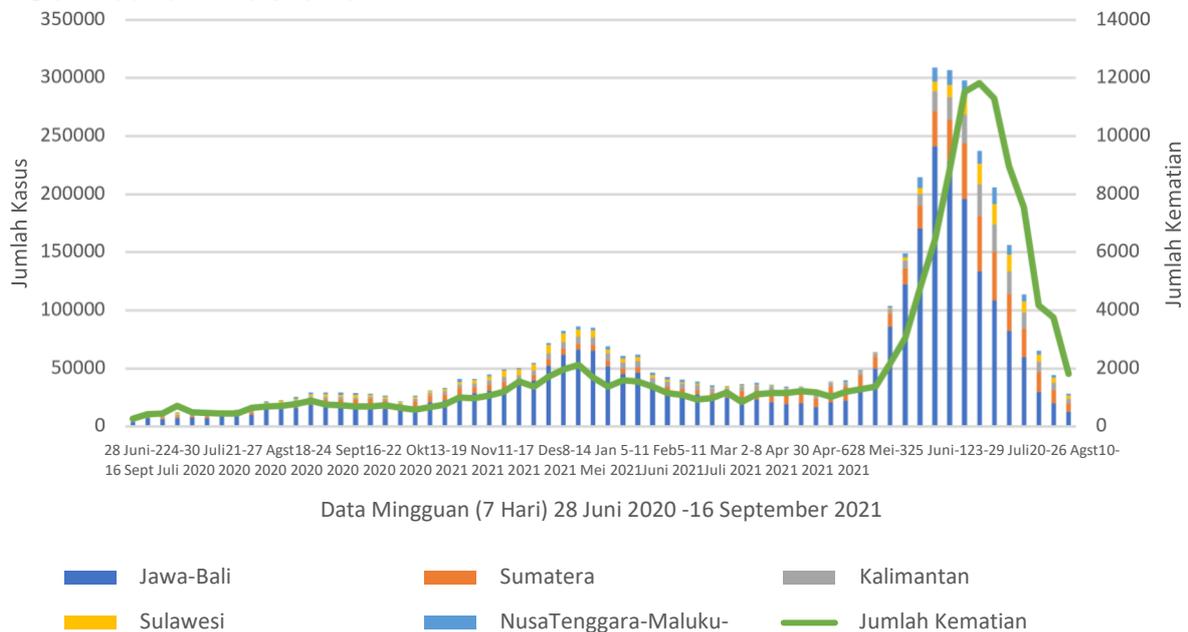
IKHTISAR MINGGUAN COVID-19

Edisi 9, terbit 19 September 2021

Data dalam laporan situasi ini menggunakan data berdasarkan 7DMA (10-16 September 2021) yang diakses dari visualisasi data Pusdatin, Kemkes dan ppt ketahanan per tanggal 17 September 2021 (data per 16 September 2021). Data WGS berasal dari "Ringkasan Hasil Pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS) Virus SARS-CoV-2" yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Jejaring laboratorium Surveilans Genom SARS-CoV-2 di Indonesia, minggu epidemiologi ke-37

A. SITUASI COVID DI INDONESIA

1. Gambaran Nasional



Gambar 1. Kasus dan Kematian Mingguan di Indonesia

- Secara kumulatif nasional sampai 17 September 2021 tercatat 4.185.144 kasus terkonfirmasi, dengan besaran insiden kasus 10,27/100.000 penduduk per minggu dengan demikian kasus konfirmasi menurun 36,67%. Total jumlah kematian tercatat 140.138 kasus, dengan besaran insiden 0,66/100.000 penduduk per minggu. *Positivity rate* 3 per minggu. Indikator transmisi komunitas terus memperlihatkan perbaikan situasi, saat ini sudah berhasil mencapai tingkat 1.
- Tren kasus konfirmasi dan tren rawat inap semakin menurun, sehingga persentase keterpakaian tempat tidur (%BOR) isolasi COVID seluruh provinsi sudah berada dalam level memadai (<60% per minggu). Namun demikian penambahan tempat tidur tetap dilakukan, sampai dengan 17 September 2021, jumlah tempat tidur COVID-19 tersedia sebanyak 111.925 tempat tidur.

2. Gambaran Regional

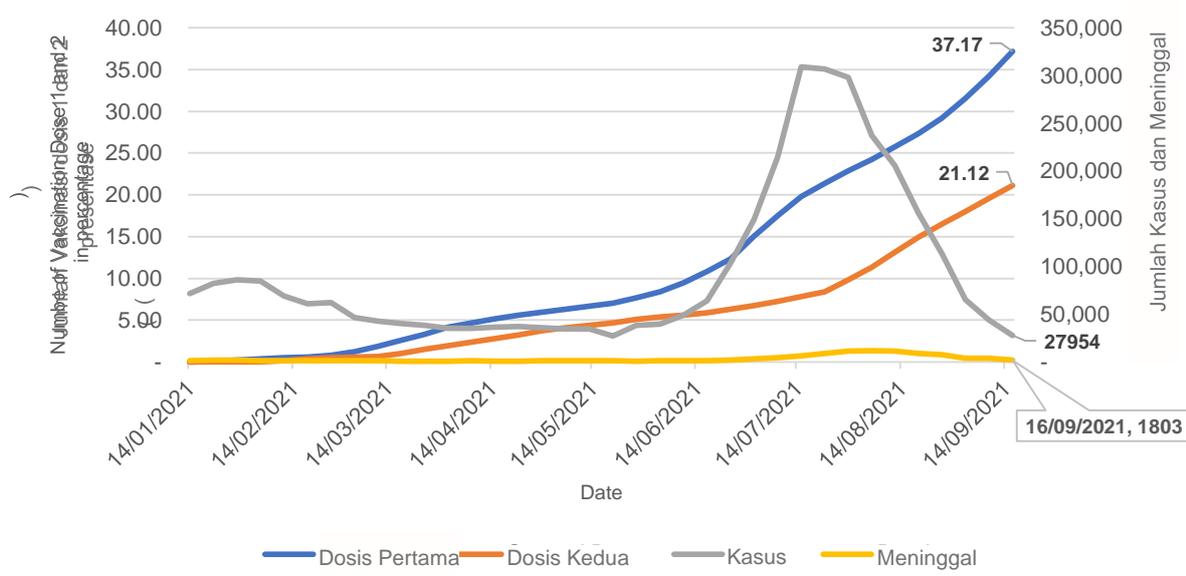
- **Situasi kasus dan kematian**

Jumlah kasus baru di seluruh provinsi menunjukkan penurunan. Provinsi Papua Barat juga mengalami penurunan kasus yang paling besar (-71,3%) dan penurunan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara (-16,1%). Jumlah kematian menurun kecuali 3 provinsi. Selain penurunan kasus yang paling kecil di antara seluruh provinsi, Kalimantan Utara juga masih mengalami peningkatan kasus kematian sebesar 22,7%. Harus diwaspadai meningkatnya kematian di 2 provinsi secara ekstrim, yaitu Papua Barat (200%) dan Papua (488,9%). Perlu diselidiki penyebab meningkatnya kematian yang sangat besar ini, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada di Papua (SDM, akses internet) kemungkinan besar, hal tersebut disebabkan keterlambatan pelaporan sehingga data menumpuk pada satu waktu.
- **Situasi vaksinasi**

Cakupan vaksinasi COVID-19 belum banyak berubah dibandingkan dengan minggu lalu. Provinsi yang memiliki cakupan diatas 50% masih berjumlah 4 provinsi (DKI Jakarta, Bali, Kep. Riau, dan DIY) dan masih ada 2 provinsi yang cakupan vaksinasinya dibawah 20% yaitu Sumatera Barat dan Lampung.
- **Situasi *testing* dan *tracing***

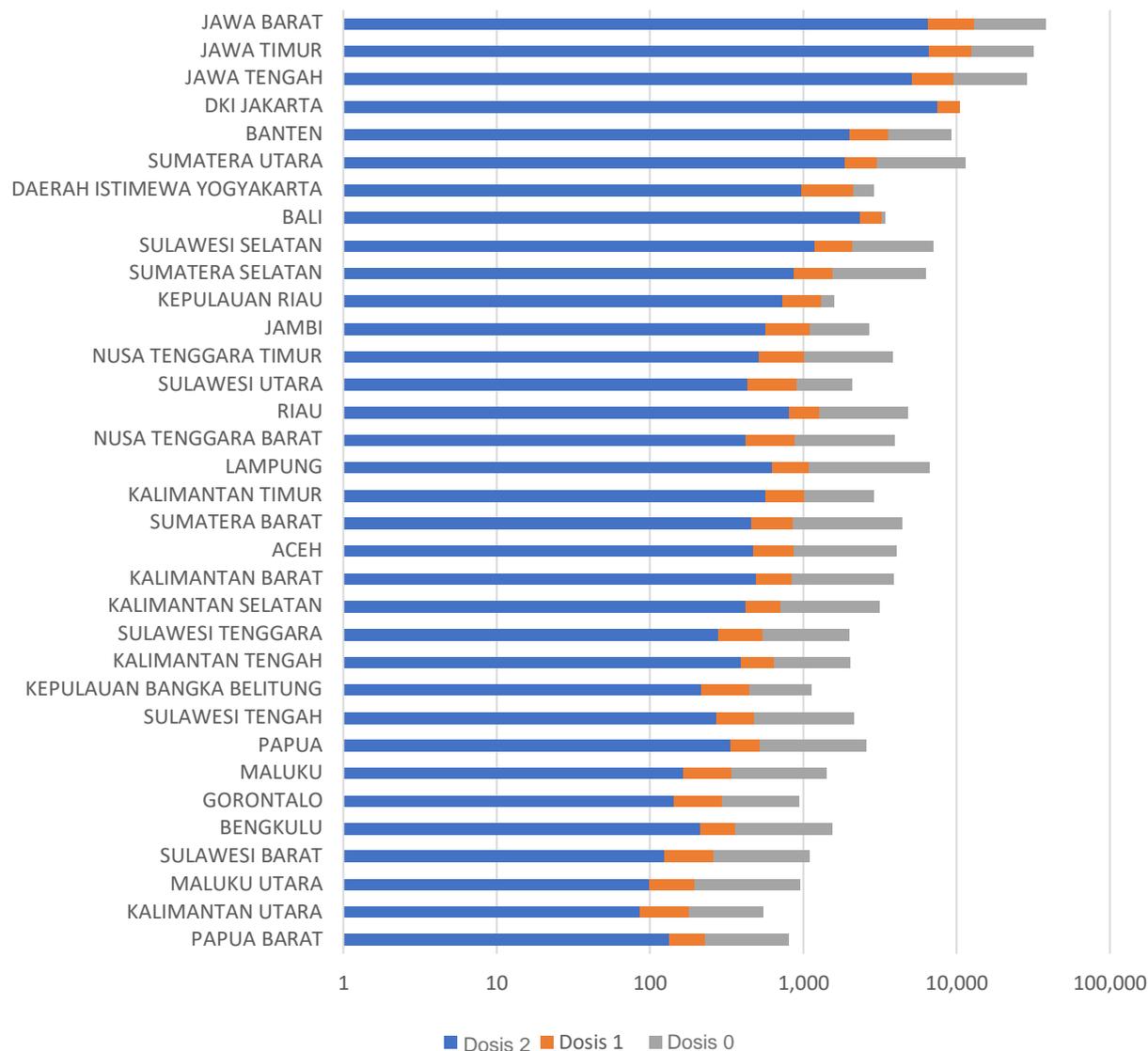
Tren *testing* sudah semakin membaik, hal ini ditunjukkan dengan angka *positivity rate* yang memadai terdapat di 30 provinsi, bertambah sebanyak 7 provinsi dari minggu sebelumnya. Empat provinsi yang masih berada di level sedang (5-10% per minggu) yaitu Aceh, Kalimantan Utara, Bangka-Belitung dan Sulawesi Tengah. Sudah tidak ada provinsi pada level terbatas. Hanya saja pada indikator *tracing*, 1 provinsi pada level memadai yaitu Jawa Timur. 23 provinsi di level terbatas (<5 per minggu) dan 10 provinsi berada dalam level sedang (5 – 9 per minggu).

3. Gambaran Kinerja Vaksinasi



Gambar 2. Sandingan Kasus, Kematian dan Persentase Cakupan Vaksinasi Nasional Sejak Dimulainya Vaksinasi (per 16 September 2021)

- Sejak Juli 2021, angka kasus dan kematian konsisten menurun seiring dengan peningkatan vaksinasi yang signifikan (Gambar 2).
- Dibandingkan dengan minggu sebelumnya, angka kasus dan kematian menunjukkan penurunan. Kasus minggu sebelumnya adalah 44.262 (berkurang sebanyak 16.308 orang) dan kematian 3.760 (berkurang sebanyak 1.957 orang).
- Pemberian vaksin terus mengalami kenaikan dari minggu sebelumnya. Pemberian vaksin pada minggu sebelumnya yaitu 19,59% penduduk menerima dosis 2 (bertambah 1,53%), dan 34,20% penduduk menerima dosis 1 (bertambah 2,97%).

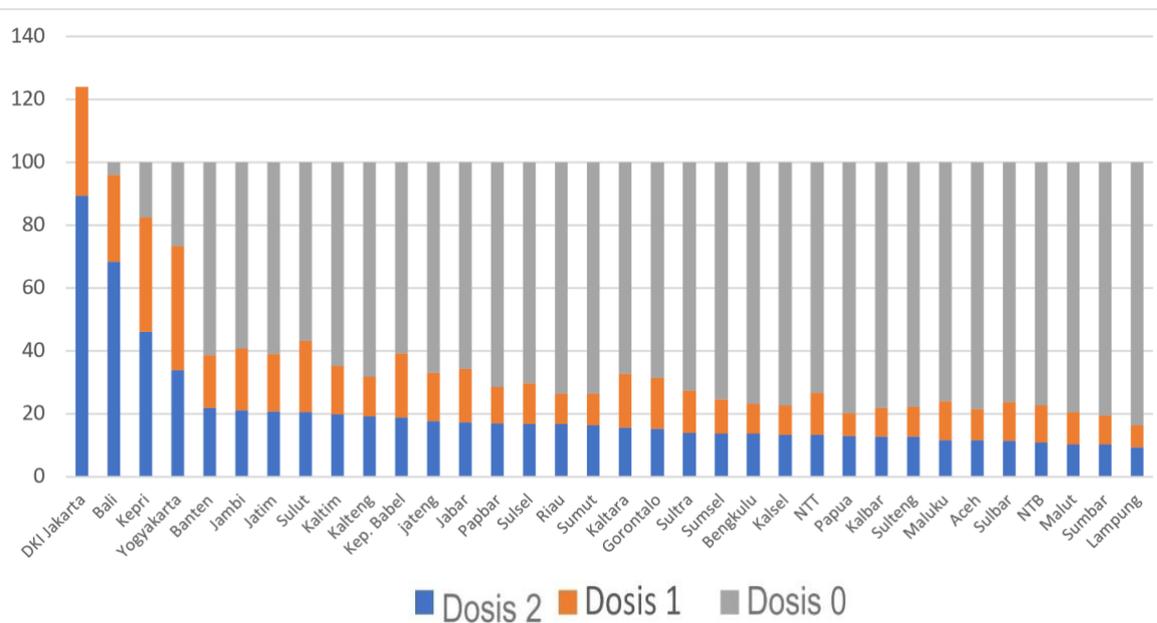


Gambar 3. Jumlah Penduduk dengan 2 Dosis, 1 Dosis dan 0 Dosis (per 16 September 2021)

Keterangan:

- Dosis 2 : penduduk yang sudah mendapatkan vaksin dosis ke satu dan dua.
- Dosis 1 : penduduk yang baru mendapatkan vaksin dosis ke satu.
- Dosis 0 : penduduk yang belum mendapatkan vaksin berdasarkan target.

- Jawa Barat adalah provinsi yang paling banyak jumlah penduduk yang belum mendapatkan vaksin, yaitu lebih dari 24 juta jiwa dari target sekitar 37 juta jiwa.
- Provinsi yang penduduknya telah mendapatkan vaksin dosis 1 pada kisaran 1 juta hingga 6 juta penduduk adalah DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, sedangkan 27 provinsi lainnya baru mencapai ratusan ribu jiwa, bahkan ada yang masih puluhan ribu penduduk (Papua Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat).



Gambar 4. Cakupan Vaksinasi 2 Dosis, 1 Dosis dan 0 Dosis Terhadap Target Sasaran Vaksinasi (per 16 September 2021)

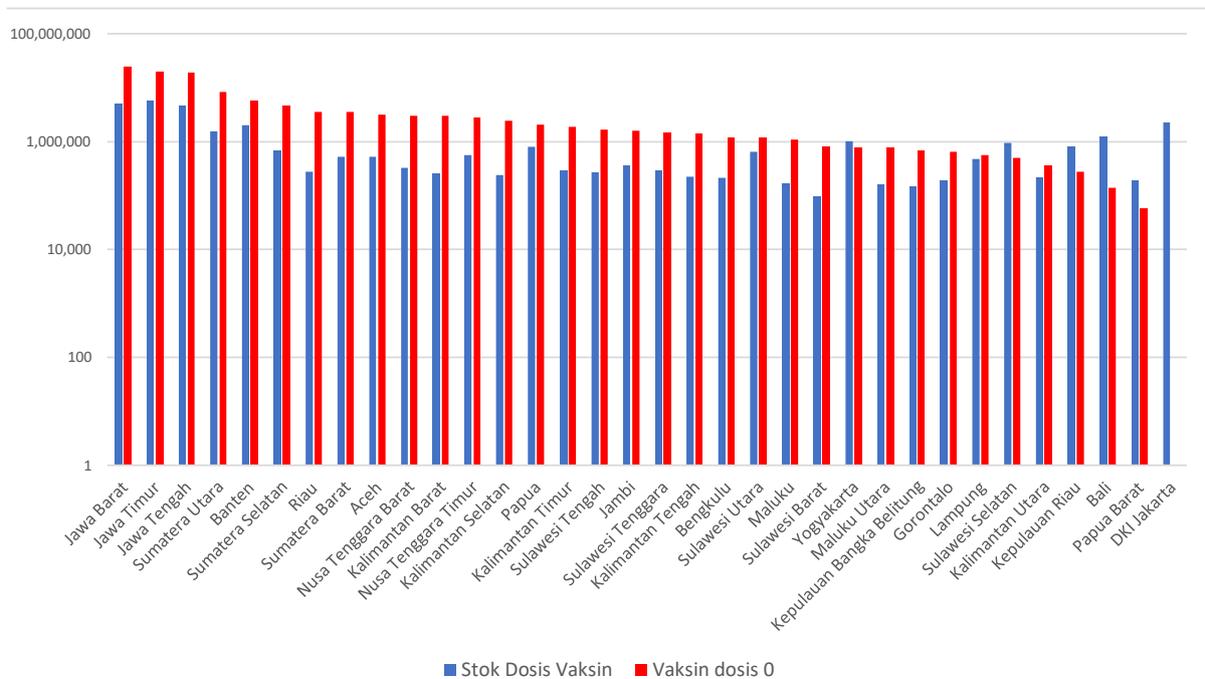
Keterangan:

Dosis 2 : persentase penduduk yang sudah mendapatkan vaksin dosis ke satu dan dua.

Dosis 1 : persentase penduduk yang baru mendapatkan vaksin dosis ke satu.

Dosis 0 : persentase penduduk yang belum mendapatkan vaksin berdasarkan target.

- Capaian DKI Jakarta untuk masyarakat yang telah mendapatkan vaksin pertama melebihi 100% (Gambar 4).
- Persentase penduduk yang mendapatkan vaksin dosis 2 saat ini paling banyak di DKI Jakarta (82,28%) dan Bali (68,42%). Dengan target cakupan vaksinasi penduduk sebesar 70% maka DKI Jakarta dapat dikatakan telah mencapai target.
- Salah satu upaya percepatan dan perluasan vaksinasi adalah dengan pelonggaran syarat administrasi untuk mendapatkan vaksin yaitu hanya dengan menunjukkan kartu identitas penduduk maka mereka yang beralamat di luar DKI Jakarta dan Bali bisa mendapatkan layanan vaksin di area tersebut.
- Dengan pelonggaran syarat administrasi untuk mengakses vaksin, maka kesiapan logistik akan menjadi penentu dalam mensukseskan program vaksin.



Gambar 5. Stok dosis vaksin per 16 September 2021 dibandingkan dengan penduduk yang belum mendapatkan vaksin berdasarkan target.

Sumber: <https://vaksin.kemkes.go.id diakses 16 September 2021>. Data tergantung pada pelaksanaan input data oleh Faskes di SMILE dan PCARE. Jika input data tidak dilaksanakan secara rutin dan lengkap maka berpengaruh pada perkiraan stok dosis vaksin dan ketepatan waktu data.

- Jumlah stok vaksin yang tersedia di provinsi di Indonesia sebagian besar kurang dari jumlah penduduk yang belum mendapatkan vaksin dosis 1 maupun 2 (Gambar 5).
- DKI Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau memiliki kecukupan stok vaksin untuk penduduknya, baik untuk dosis 1 atau untuk dosis 2. Di sisi lain, DKI Jakarta dinilai telah melebihi target penduduk yang mendapatkan vaksin. Mengingat DKI Jakarta adalah negara ibukota dengan berbagai wilayah penyangga maka pelaporan perlu dipilah untuk memastikan apakah seluruh penduduk yang ditargetkan benar-benar sudah mendapatkan vaksin semua atau justru penduduk di luar target yang menyumbang tingginya cakupan vaksin di DKI Jakarta.

4. Sekuensing Virus SARS-CoV-2 di Indonesia

- Pada minggu epidemiologi ke-37, telah dilakukan sekuensing virus SARS-CoV-2 sebanyak 278 kasus dari 14 provinsi yaitu Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Jambi, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Barat.
- Hasil sekuensing dapat diidentifikasi *Variant of Concern* (VoC) Delta sebanyak 89,5% (249/278). Tidak ditemukan adanya VoC Alpha dan Beta di minggu ke-37. Sedangkan varian yang menjadi *further of alert monitoring* B.1.466.2 sebanyak

6,1% (17/278) kasus. Tidak ada penambahan *Variant of Interest* (VoI) dan Kappa dalam 4 minggu terakhir serta belum ditemukan adanya VoI lainnya. Distribusi sekuens dan VOC dari tiap provinsi pada minggu ke-37 dapat dilihat pada gambar 12 dan tabel 4.



Gambar 6. Sebaran sekuens virus SARS-CoV-2 dan VoC di Indonesia pada minggu ke-37. Pengelompokan lineage, VoC, maupun VoI dianalisis dengan aplikasi *Pangoline* (github.com/cov-lineages/pangolin) v.3.1.11. Hasil analisis dapat berubah seiring waktu dengan adanya penambahan data genom dan perbaharuan aplikasi *Pangoline*. Sumber : Jejaring Surveilans Genom.

Tabel 1. Distribusi penambahan jumlah sekuens dan VoC Alpha, Beta, dan Delta di setiap provinsi pada minggu ke-37 (12 - 18 September 2021) berdasarkan **tanggal publikasi** GISAID.

No	Provinsi	TOTAL Sekuens		Total Varian Alpha		Total Varian Beta		Total Varian Delta	
		11 Sept 2021	18 Sept 2021	11 Sept 2021	18 Sept 2021	11 Sept 2021	18 Sept 2021	11 Sept 2021	18 Sept 2021
1	Aceh	48	86	0	0	0	0	18	53
2	Bali	459	468	1	1	1	1	23	33
3	Bangka Belitung	28	48	0	0	0	0	27	42
4	Banten	178	198	0	0	0	0	22	28
5	Bengkulu	8	13	0	0	0	0	3	8
6	DI Yogyakarta	79	79	0	0	0	0	20	20
7	Gorontalo	3	3	0	0	0	0	1	1
8	Jakarta	1449	1516	37	37	12	12	777	831
9	Jambi	359	382	0	0	0	0	1	13
10	Jawa Barat	854	998	10	11	2	7	322	434
11	Jawa Tengah	285	294	1	1	0	0	191	198
12	Jawa Timur	190	231	2	2	2	2	20	49
13	Kalimantan Barat	58	58	0	0	0	0	28	28
14	Kalimantan Selatan	88	118	1	1	0	0	28	33
No	Provinsi	TOTAL Sekuens		Total Varian Alpha		Total Varian Beta		Total Varian Delta	
		11 Sept 2021	18 Sept 2021	11 Sept 2021	18 Sept 2021	11 Sept 2021	18 Sept 2021	11 Sept 2021	18 Sept 2021

15	Kalimantan Tengah	38	38	0	0	0	0	3	3
16	Kalimantan Timur	364	364	0	0	0	0	299	299
17	Kalimantan Utara	30	77	0	0	0	0	16	59
18	Kep Riau	184	201	7	7	0	0	3	7
19	Lampung	13	15	1	1	0	0	3	6
20	Maluku	13	13	0	0	0	0	10	9
21	Maluku Utara	31	46	0	0	0	0	30	43
22	NTB	62	81	0	0	0	0	46	64
23	NTT	139	162	0	0	0	0	102	102
24	Papua	25	25	0	0	0	0	12	12
25	Papua Barat	28	31	0	0	0	0	12	15
26	Riau	54	54	1	1	0	0	30	30
27	Sulawesi Barat	23	45	0	0	0	0	0	22
28	Sulawesi Selatan	68	73	0	0	0	0	14	19
29	Sulawesi Tengah	34	57	0	0	0	0	20	42
30	Sulawesi Tenggara	23	23	0	0	0	0	20	20
31	Sulawesi Utara	21	49	0	0	0	0	8	27
32	Sumatera Barat	269	269	0	0	0	0	75	75
33	Sumatera Selatan	43	43	1	1	0	0	9	9
34	Sumatera Utara	268	281	2	2	0	0	73	86
	Total	5816	6439	64	65	17	22	2266	2720

Sumber: Jejaring Surveilans Genom

B. KAJIAN KEBIJAKAN

1. Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

- Pemerintah telah menetapkan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas untuk zonasi COVID-19 level 1 dan 2 dengan persyaratan ketat. Pelaksanaan pembelajaran masih dikombinasikan antara PTM dan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh).
- Terdapat penyesuaian SKB Empat Menteri Tentang Panduan Pembelajaran Tatap Muka mulai Januari 2021 yakni pembelajaran tatap muka dapat diberlakukan apabila pemda sudah memberikan izin dan satuan pendidikan memenuhi semua syarat berjenjangnya, maka PTM diperbolehkan, namun tidak diwajibkan.¹ Berdasarkan data Satgas COVID-19 hingga 22 Agustus 2021, 31% dari 261.040 satuan pendidikan yang berada pada daerah dengan PPKM Level 1,2 dan 3 telah menyelenggarakan PTM secara terbatas.²
- Saat ini vaksinasi diperbolehkan untuk usia 12 tahun ke atas, anak usia sekolah dasar adalah kelompok yang belum mendapatkan perlindungan dari vaksinasi. Oleh karena itu, terkait kesiapan PTM di masa pandemi maka aspek pelaksanaan protokol kesehatan akan berperan penting.

¹ Paparan Mendikbud: SKB Empat Menteri Tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

² <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58356838>

- Pada akhir tahun 2020, Direktorat Kesehatan Dasar Kemendikbud telah memulai Survey Persiapan PTM. Namun sampai saat ini hanya 59,17% satuan Pendidikan yang merespon², 47,58%-nya masih dalam tahap proses verifikasi validasi dan baru 10,78% yang disetujui³. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota serta terdapat 69.19% satuan pendidik yang belum melaporkan.⁴
- Dari survei kepada kepala satuan Pendidikan tersebut, didapat hasil rerata di atas 90% untuk kepemilikan jamban bersih, kepemilikan thermogun, dll. Namun terkait pendataan riwayat perjalanan, penyelesaian isolasi mandiri dan pembentukan satgas satuan Pendidikan dilaporkan masih di bawah 80%.
- Pada usia sekolah untuk kelompok 12-17, cakupan vaksinasi tahun masih sangat rendah yakni 12,24% (dosis ke-1) dan 8,53% (dosis ke-2). Di sisi lain cakupan vaksinasi tenaga pendidik belum terpilah karena masih tergabung dengan cakupan petugas publik keseluruhan⁵,
- Dalam periode berjalannya kegiatan PTM terbatas, telah ditemukan beberapa kasus yang dilaporkan. Pada 15 September 2021, dalam laporan situasi minggunya, WHO menginformasikan mengenai klaster COVID-19 baru di daerah Kalimantan Barat dan Sumatra Barat.⁶ Di laporan tersebut tercatat bahwa 54 siswa dari SMA 1 Padang Panjang di Sumatera Barat terpapar COVID-19 sejak diberlakukannya PTM terbatas pada 4 September 2021.
- Implementasi PTM di berbagai kabupaten/kota beragam sesuai dengan pertimbangan daerah masing-masing. Contohnya penerapan model *hybrid* (daring dan luring bergantian) di kota Samarinda mulai 20 September 2021 sedangkan di Banjarmasin PTM dilaksanakan pada wilayah zona hijau dan kuning dengan catatan 80% pendidik sudah divaksinasi COVID-19.⁷
- Dalam SKB Empat Menteri menyebutkan tugas dan tanggung jawab monitoring pelaporan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota serta Kanwil Kemenag bersama dengan Satgas COVID-19 setempat di laman yang ditentukan. Namun dalam tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi/ Kab/Kota, belum disebutkan mekanisme dan tools monitoring pelaporan atas kinerja Puskesmas khusus terkait peran *testing*, *tracing* dan *treatment* proses pembelajaran tatap muka di wilayah sekolah berada.

² <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/home>

³ <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/verval/kesiapan-belajar/nasional>

⁴ <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/kebijakan/kabkota>

⁵ <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines>

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210916205222-20-695487/who-soroti-klaster-sekolahtatap-muka-193-siswa-positif>

⁷ <https://www.republika.co.id/berita/qzm3h7368/senin-besok-banjarmasin-laksanakan-ptm-serentak>

2. Kesiapan Tempat Wisata

- Pariwisata menjadi salah satu pemasukan devisa di berbagai negara karena pada umumnya tiap negara memiliki keunikan tersendiri sehingga banyak negara yang mengandalkan sektor pariwisata dalam perekonomiannya. Adanya pandemi yang memicu pembatasan perjalanan telah menghantam keras sektor pariwisata dan tiap negara terus melakukan strategi untuk menghidupkan kembali sektor ini namun dengan tetap menekan risiko penularan.

Tata Laksana Bagi Wisatawan di Beberapa Negara

- Aspek yang berlaku umum dalam hal tata laksana bagi wisatawan di beberapa negara adalah tes dengan metode *gold standard* yaitu PCR dengan durasi masa tes sebelum keberangkatan yang berbeda-beda.
- Dibeberapa negara juga diterapkan persyaratan vaksinasi sebelum keberangkatan, sedangkan untuk Amerika Serikat menyediakan sentra vaksin bagi pengunjung yang belum vaksinasi.
- Hal yang sama juga dengan pemberlakuan pelacakan yang secara umum menggunakan sistem informasi pelacakan yang juga berlaku untuk penduduk negara masing-masing.
- Sedangkan untuk karantina terdapat berbagai variasi durasi karantina di berbagai negara. Penerapan karantina di Perancis hanya berlaku untuk beberapa negara asal pengunjung.
- Hal ini menunjukkan tata laksana pada umumnya ada pada aspek tes, vaksin, karantina dan pelacakan keragaman standar teknis yang beragam. Secara sistem informasi, akan sangat ideal apabila sistem informasi terkait aspek tata laksana tersebut menjadi satu sistem, namun isu ketahanan dan keamanan nasional menjadi aspek yang akan sulit untuk disepakati.

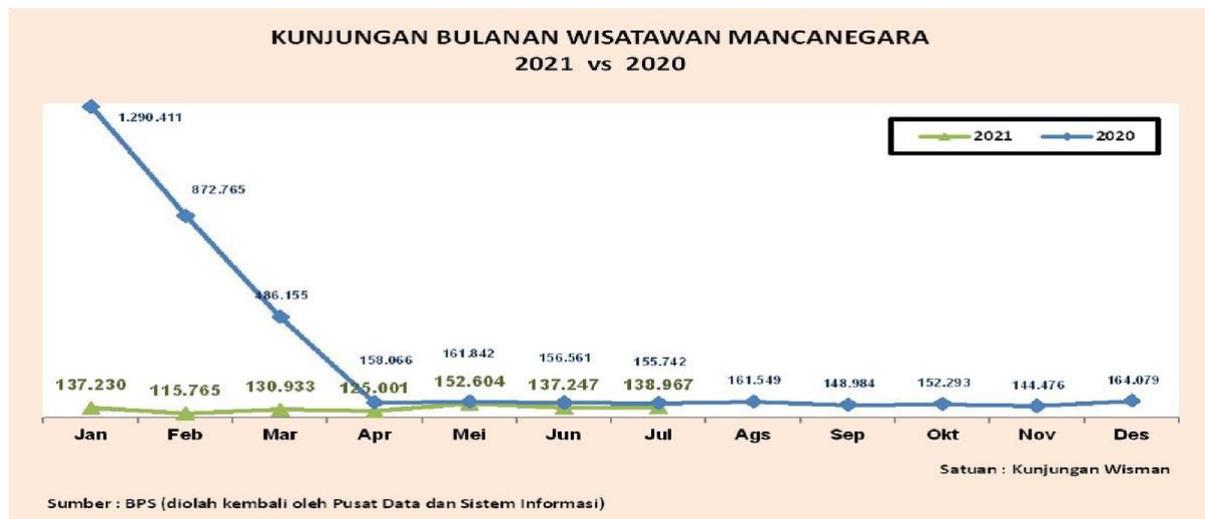
Tabel 2. Tata laksana bagi wisatawan di beberapa negara

Negara	Karantina Wisatawan Asing	Testing	Vaksin	Aturan Lain	Sumber informasi
Singapura	Sesuai <i>save travel lanes</i> . Mengikuti ketentuan <i>stay home notice</i> . Karantina antara 7-14 hari.	PCR negatif max jam sebelum keberangkatan, tes saat kedatangan dan di akhir masa karantina	Status vaksinasi 24 lengkap	Pengkategorian negara wisatawan (peraturan berbeda untuk setiap kategori) Penggunaan aplikasi <i>trace together</i> selama di Singapura, termasuk saat memasuki restoran, pusat belanja dan pertokoan.	https://safetravel.ica.gov.sg/health www-visitsingapore.com.

Negara	Karantina Wisatawan Asing	Testing	Vaksin	Aturan Lain	Sumber informasi
Turki	Karantina hanya untuk wisatawan dari negara tertentu	PCR negatif max 72 jam atau rapid antigen max 48 jam sebelum keberangkatan. PCR saat kedatangan di sampling.	Status vaksinasi lengkap 14 hari sebelum keberangkatan.	Penggunaan aplikasi <i>Hayat Eve Sigar</i> (HES)	https://www.visasturkey.com/ https://tr.usembassy.gov/covid-19-information-2/
Perancis	Karantina 7-10 hari bagi wisatawan yang belum di vaksin, sesuai kategori asal negara.	PCR negatif max 48 - 72 jam sebelum keberangkatan dan tes saat kedatangan (tergantung kategori negara & status vaksin)	Status vaksinasi lengkap (Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson& Johnson)	Penggunaan kartu kesehatan atau aplikasi <i>TousAntiCovid</i>	https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nations-in-france/#sommaire_1
USA	Berlaku di beberapa negara bagian	PCR negatif max 72 jam sebelum penerbangan	Terdapat sentra vaksin bagi wisatawan yang belum mendapatkan vaksinasi covid	Ada larangan masuk bagi wisatawan dari beberapa negara	https://www.visittheusa.com/us-covid19-travelguidelines

Situasi Wisata di Indonesia

- Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada bulan Juli 2021 di seluruh pintu masuk jika dibandingkan dengan bulan Juli 2020 mengalami peningkatan, tercatat kebangsaan yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu: Jerman sebesar 287,04%, Mesir sebesar 191,67%, Rusia sebesar 187,39%, Perancis sebesar 156,18% dan Arab Saudi sebesar 150,53%.



Gambar 7. Kunjungan Bulanan Wisatawan Mancanegara 2020-2021

- Dari 22 pintu masuk negara yang terdiri atas bandara, pelabuhan dan pos lintas batas negara (PLBN), jumlah kedatangan sejak 28 Desember 2020-16 September 2021 tertinggi ada di Bandara Soekarno Hatta sebanyak 354.418 sedangkan untuk kategori pelabuhan ada di Pelabuhan Batam sebanyak 27.522 dan PLBN

di Entikong sebanyak 23.875. Sedangkan untuk pelaku perjalanan internasional tertinggi masuk dari Malaysia, Arab Saudi, dan UEA.

- Terkait tata laksana pelaku perjalanan yang datang di pintu masuk, persyaratan tambahan untuk permohonan visa yang harus dipenuhi oleh pemohon dari luar negeri adalah kartu/sertifikat vaksinasi COVID-19 dosis lengkap, surat pernyataan bersedia mematuhi protokol kesehatan di Indonesia serta bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan. Apabila WNA tidak memiliki asuransi kesehatan maka harus membuat surat pernyataan bersedia menanggung biaya pengobatan secara mandiri jika terpapar COVID-19 selama berada di Indonesia.
- Tata laksana yang berlaku di Indonesia pada prinsipnya sama dengan yang berlaku di berbagai negara lainnya.



Sumber : Kemlu.go.id

Gambar 8. Persyaratan Kedatangan dari Luar Negeri ke Indonesia

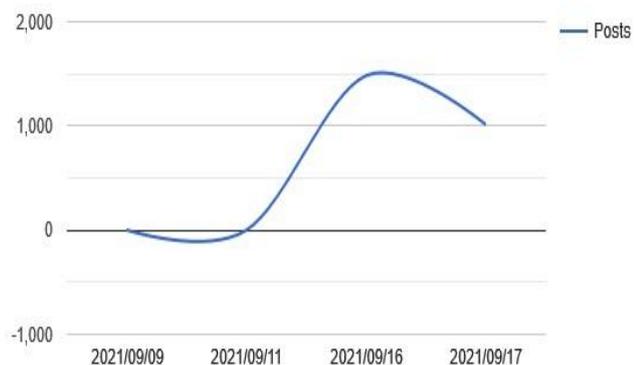
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) memiliki berbagai strategi pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat dilakukan pasca pandemi COVID-19. Salah satunya adalah akselerasi vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE. Karantina bagi pelaku perjalanan internasional dilaksanakan di Bandara Udara/Pelabuhan pertama saat memasuki Negara Republik Indonesia.
- Menparekraf juga telah menyiapkan lima langkah strategis untuk mendorong pemulihan ekonomi kreatif dan pariwisata:
 - peningkatan kapasitas SDM yang berbasis pada kualitas dan berkelanjutan lingkungan.

- o revitalisasi destinasi dan infrastruktur ekonomi kreatif.
- o peningkatan resiliensi dan daya saing usaha, melalui pemberian insentif, akses permodalan, sertifikasi usaha, dan CHSE.
- o inovasi produk dan jasa yang lebih berkualitas dan berkearifan lokal.
- o pemulihan dan perluasan pasar, melalui program Beli Kreatif Lokal, Bangga berwisata #DiIndonesiaAja, serta pemasaran produk ekraf.

3. Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Aplikasi Peduli Lindungi

Data yang digunakan dalam analisis ini diambil dari platform sosial media Twitter, dengan kata kunci Peduli Lindungi dan pedulilindungi. Analisis menggunakan tools Netlytic, dengan periode data 9 September – 18 September 2021.

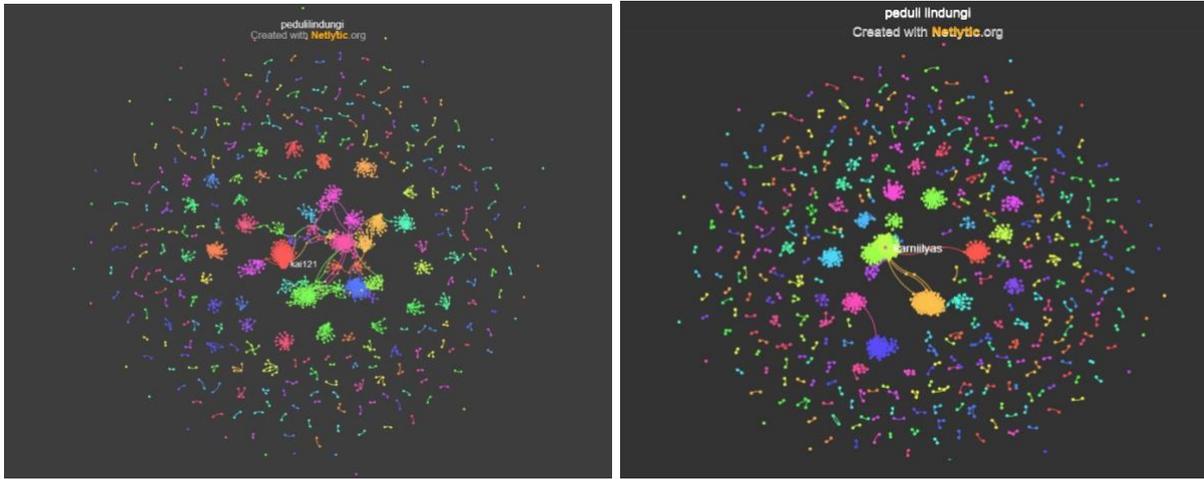
- Pembicaraan mengenai Peduli Lindungi, dimulai pada tanggal 9 September 2021, sempat menurun pada 10 – 11 September 2021. Pembicaraan mulai naik kembali pada tanggal 12 September 2021, memuncak pada tanggal 16 September 2021. Ada 1.819 postingan di twitter tentang peduli lindungi selama 2 hari (16-18 september 2021).



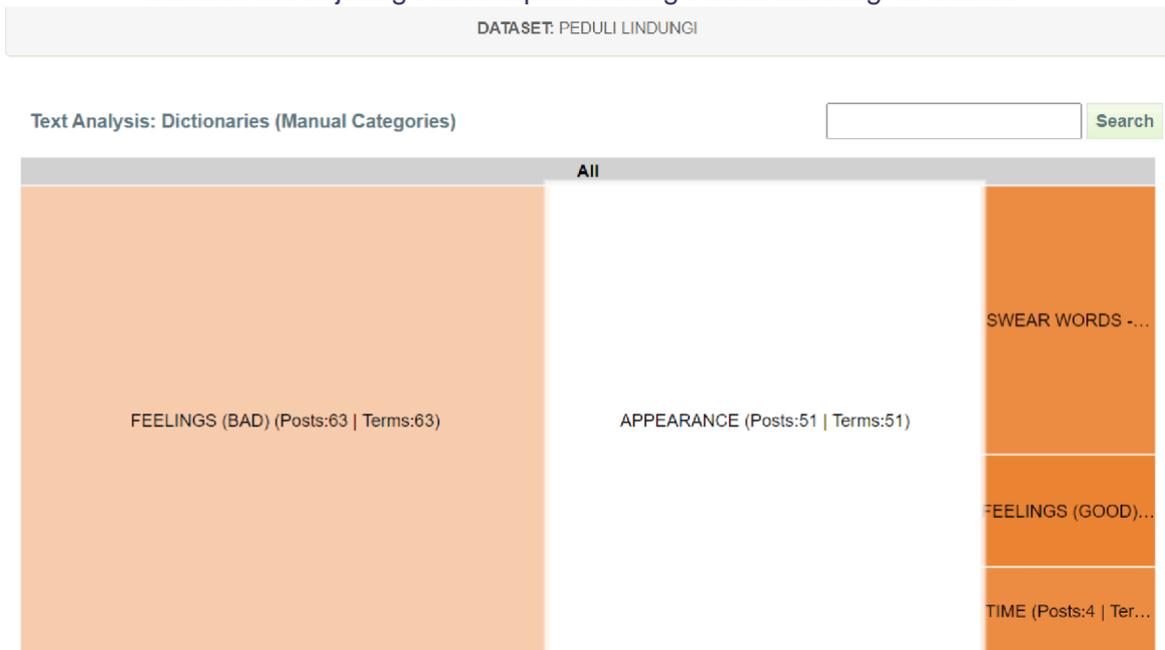
Gambar 9. Tren Pembicaraan Peduli Lindungi di media sosial

- *Network analysis* (analisis jejaring) memperlihatkan jaringan percakapan yang luas. Terdapat beberapa kluster yang cukup besar dan saling terhubung⁸. Kluster yang besar diantaranya akun individu seperti tokoh masyarakat Karni Ilyas, akun @ABSetyono, @txtdaridgmbk. Akun resmi seperti @Plindungi termasuk kluster yang cukup besar juga, selain akun twitter, kluster besar juga terbentuk dari tagar #KAI121. Selain kluster yang besar, nampak juga terbentuk kluster-kluster lebih kecil yang menandakan percakapan mengenai Peduli Lindungi banyak dibahas, namun tidak semua saling terhubung/mempengaruhi.
- Hasil pemetaan analisis jejaring percakapan terhadap teks Peduli Lindungi, **sebagian besar menunjukkan sentimen negatif**. Sentimen negatif artinya masyarakat memandang secara emosional bahwa Peduli Lindungi adalah hal yang tidak tentu atau kurang baik.

⁸ Kluster yang saling terhubung menandakan bahwa akun ataupun tagar terkait cukup banyak *dimention* atau di *re-tweet*

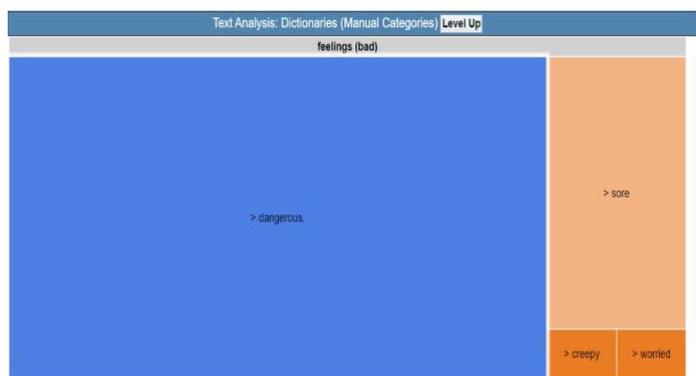


Gambar 10. Jejaring Percakapan tentang Peduli Lindungi di Twitter



Gambar 11. Text Analysis Peduli Lindungi

- Hasil *text analysis* menunjukkan kotak *Feelings (Bad)* paling besar, artinya sentimen yang terbentuk dari pembahasan mengenai Peduli Lindungi didominasi negatif. Apabila kotak tersebut dirinci pada level di bawahnya, maka yang tampak adalah



Gambar 12. Text Analysis Peduli Lindungi

Level Down

tweet mengenai “*dangerous, creepy, worried*”.⁹

⁹ Ketiga kata tersebut menunjukkan perasaan bahaya, menakutkan, dan cemas.

- Sentimen negatif ini di antaranya **kekhawatiran tidak adanya privasi dan keamanan data** yang tersimpan pada aplikasi Peduli Lindungi, isu terkait **basis data dan pengembang aplikasi Peduli Lindungi**, masih terdapat **kesulitan dalam mengakses aplikasi** khususnya untuk WNA, masih ada **ketidaksinkronan data vaksin dengan sertifikat digital** pada aplikasi.
- Namun, terdapat kluster dengan sentimen netral dan positif yang membantu dalam “menjawab” sentimen negatif tersebut. Kluster tersebut biasanya mencuit tentang informasi yang dikeluarkan dari Pemerintah terkait aplikasi Peduli Lindungi, ataupun memberikan pengalaman/*best practice* dalam penggunaannya. Di antaranya jejaring percakapan dari tokoh masyarakat Karni Ilyas, menyarankan masyarakat golongan usia lanjut untuk memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi dengan bantuan keluarganya yang lebih muda. Kluster dengan tagar KAI121 memberikan informasi mengenai penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai persyaratan untuk dapat menggunakan moda transportasi KA, sedang kluster @ABSetyono aktif mencuit mengenai “jawaban” tweet dengan sentimen negatif.

Gambaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Literasi Digital di Indonesia

- Pemanfaatan aplikasi yang bersifat personal (data diproduksi dan diinput oleh tiap individu) seperti Peduli Lindungi sangat penting dan efektif untuk monitoring persyaratan tes, vaksinasi, pelacakan dan pergerakan penduduk apabila dibandingkan dengan aplikasi yang bersifat kelembagaan (data diproduksi dan diinput oleh puskesmas misalnya). Meskipun demikian hal ini perlu diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan literasi digital penduduk, karena apabila kesiapan ini tidak seiring maka pemanfaatan salah satu aplikasi akan tersegmentasi sehingga tidak dapat memberikan gambaran keseluruhan.
- Di sisi lain, pemanfaatan aplikasi juga akan mendorong peningkatan infrastruktur dan literasi digital masyarakat.
- Pada tanggal 18 Agustus 2021, dengan mengadopsi metodologi yang distandarkan oleh ITU¹⁰, BPS merilis IP-TIK (Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi) 2020 yang hasilnya menunjukkan bahwa dari tiga subindeks yang berkontribusi pada IP-TIK nasional, terdapat satu subindeks yang mengalami peningkatan pesat. Subindeks Penggunaan mengalami peningkatan pesat bila dibandingkan dengan Subindeks Akses dan Infrastruktur dan Subindeks Keahlian seperti dalam *actō*. Hal ini mengindikasikan bahwa selama masa pandemi, persentase individu pengguna internet bertambah secara signifikan. Akan tetapi, hal ini tidak dibarengi dengan pertumbuhan yang signifikan

¹⁰ *International Telecommunication Union* (ITU) merupakan bagian dari PBB yang bergerak dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebagai organisasi internasional, ITU membakukan pengukuran indeks pembangunan TIK.

dalam hal akses dan infrastruktur serta peningkatan keahlian (literasi) melalui pendidikan.

- Dalam lingkup provinsi, terjadi kecenderungan peningkatan kesenjangan pembangunan TIK yang ditunjukkan dari jarak antara provinsi dengan IP-TIK tertinggi dan provinsi dengan IP-TIK terendah yang semakin lebar. DKI Jakarta yang dalam dua tahun terakhir memiliki IP-TIK tertinggi dan Papua merupakan provinsi dengan IP-TIK terendah. Pada 2019, antara IP-TIK tertinggi dan terendah berselisih 3,98 dan jarak ini bertambah lebar di 2020 menjadi 4,11¹¹.

Tabel 3. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Subindeks	2019	2020	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Akses dan Infrastruktur	5,53	5,67	2,53
Penggunaan	4,85	5,34	10,10
Keahlian	5,84	5,92	1,37
IP-TIK	5,32	5,59	5,08

(Sumber: BPS)

- Hasil pengukuran kesiapan yang dilakukan oleh Lembaga internasional seperti *Network Readiness Indicator* (NRI) pun menunjukkan bahwa kondisi TIK di Indonesia masih berada di kuartil kedua dimana peringkat Indonesia ada di posisi ke-73. Meski berada di peringkat lebih baik daripada Filipina, tapi berada jauh di bawah Malaysia (34), Korea Selatan (14), dan Singapura (3).
- Sementara itu data yang dikeluarkan oleh *IMD World Digital Competitiveness Rankings* (WDCR) pada lingkup tren digital, Indonesia menyandang peringkat ke37 dari 64 negara (lampiran 2). IMD-WDCR mengukur kapasitas dan kesiapan 64 negara dalam mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital untuk transformasi ekonomi dan sosial.
- Pemeringkatan bergantung pada tiga faktor:
 1. Pengetahuan, yang melihat infrastruktur tak berwujud yang diperlukan untuk dimensi pembelajaran dan inovasi teknologi;
 2. Teknologi, yang mengkuantifikasi lanskap pengembangan teknologi digital; dan
 3. Kesiapan Masa Depan, yang mengkaji tingkat kesiapan ekonomi untuk melakukan transformasi digitalnya.

¹¹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/08/18/1848/indeks-pembangunan-teknologi-informasi-dankomunikasi--ip-tik--indonesia-2020-sebesar-5-59-pada-skala-0----10.html>

REKOMENDASI

1. Dengan kondisi infrastruktur dan literasi digital masyarakat Indonesia saat ini, maka pendekatan penanggulangan pandemi yang berbasis sistem informasi masih perlu dilakukan dari 2 sisi, baik dari sisi individu sebagai subyek data maupun dari sisi lembaga seperti puskesmas atau lainnya untuk segmen masyarakat yang akses infrastruktur atau literasi digital masih rendah.
2. Berdasarkan analisis sentimen percakapan mengenai aplikasi Peduli Lindungi dapat disimpulkan, pada dasarnya publik tidak menolak penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, namun terdapat beberapa poin yang harus lebih dijelaskan oleh Pemerintah, diantaranya :
 - a. Transparansi dalam proses pengembangan aplikasi, informasi mengenai pengembang aplikasi, serta .
 - b. Mengedukasi masyarakat tentang apa yang dapat dilakukan untuk keamanan data pada aplikasi Peduli Lindungi.
 - c. Lebih proaktif lagi dalam menjawab seputar kendala-kendala dalam penggunaan aplikasi seperti masalah sertifikat vaksin yang belum sesuai.

ANNEX

Tabel Kasus dan Kematian

Tabel Kasus-Kematian Baru 7 Hari Terakhir Per Regional dan Provinsi										
Regional	Kasus Baru 7 Hari Terakhir		Perubahan Kasus Baru dalam 7 Hari Terakhir		Kematian Baru 7 Hari Terakhir		Perubahan Kematian Baru dalam 7 Hari Terakhir			
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
	Indonesia									
Sumatera	7.283	26,1%	-	4.190	-36,5%	545	30,2%	-	214	-28,2%
Jawa-Bali	12.627	45,2%	-	7.163	-36,2%	841	46,6%	-	1.588	-65,4%
Kalimantan	4.068	14,6%	-	2.506	-38,1%	198	11,0%	-	77	-28,0%
Sulawesi	2.400	8,6%	-	1.556	-39,3%	123	6,8%	-	100	-44,8%
Nusatenggara-Maluku-Papua	1.576	5,6%	-	893	-36,2%	96	5,3%	-	22	29,7%
INDONESIA	27.954	100,0%	-	16.308	-36,8%	1.803	100,0%	-	1.957	-52,0%
Sumatera										
Provinsi	Kasus Baru 7 Hari Terakhir		Perubahan Kasus Baru dalam 7 Hari Terakhir		Kematian Baru 7 Hari Terakhir		Perubahan Kematian Baru dalam 7 Hari Terakhir			
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Aceh	1.132	15,5%	-	626	-35,6%	114	20,9%	-	20	-14,9%
Sumatera Utara	1.906	26,2%	-	1.102	-36,6%	149	27,3%	-	2	-1,3%
Sumatera Barat	638	8,8%	-	236	-27,0%	35	6,4%	-	1	-2,8%
Riau	903	12,4%	-	575	-38,9%	69	12,7%	-	90	-56,6%
Jambi	286	3,9%	-	245	-46,1%	16	2,9%	-	8	-33,3%
Sumatera Selatan	441	6,1%	-	159	-26,5%	34	6,2%	-	16	-32,0%
Bengkulu	103	1,4%	-	190	-64,8%	8	1,5%	-	4	-33,3%
Lampung	550	7,6%	-	304	-35,6%	54	9,9%	-	42	-43,8%
Kepulauan Bangka Belitung	947	13,0%	-	620	-39,6%	41	7,5%	-	22	-34,9%
Kepulauan Riau	377	5,2%	-	133	-26,1%	25	4,6%	-	9	-26,5%
SUMATERA	7.283	100,0%	-	4.190	-36,5%	545	100,0%	-	214	-28,2%
Jawa-Bali										
Provinsi	Kasus Baru 7 Hari Terakhir		Perubahan Kasus Baru dalam 7 Hari Terakhir		Kematian Baru 7 Hari Terakhir		Perubahan Kematian Baru dalam 7 Hari Terakhir			
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
DKI Jakarta	1.693	13,4%	-	528	-23,8%	66	7,8%	-	22	-25,0%
Jawa Barat	2.811	22,3%	-	1.324	-32,0%	74	8,8%	-	788	-91,4%
Jawa Tengah	2.285	18,1%	-	2.538	-52,6%	256	30,4%	-	437	-63,1%
D I Yogyakarta	1.050	8,3%	-	688	-39,6%	85	10,1%	-	33	-28,0%
Jawa Timur	3.015	23,9%	-	975	-24,4%	233	27,7%	-	282	-54,8%
Banten	473	3,7%	-	360	-43,2%	13	1,5%	-	3	-18,8%
Bali	1.300	10,3%	-	750	-36,6%	114	13,6%	-	23	-16,8%
JAWA-BALI	12.627	100,0%	-	7.163	-36,2%	841	100,0%	-	1.588	-65,4%
Kalimantan										

Provinsi	Kasus Baru 7 Hari Terakhir		Perubahan Kasus Baru dalam 7 Hari Terakhir		Kematian Baru 7 Hari Terakhir		Perubahan Kematian Baru dalam 7 Hari Terakhir			
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen		
Kalimantan Barat	949	23,3%	-	443	-31,8%	22	11,1%	-	8	-26,7%
Kalimantan Tengah	397	9,8%	-	211	-34,7%	13	6,6%	-	14	-51,9%
Kalimantan Selatan	732	18,0%	-	726	-49,8%	48	24,2%	-	25	-34,2%
Kalimantan Timur	1.224	30,1%	-	979	-44,4%	88	44,4%	-	35	-28,5%
Kalimantan Utara	766	18,8%	-	147	-16,1%	27	13,6%	-	5	22,7%
KALIMANTAN	4.068	100,0%	-	2.506	-38,1%	198	100,0%	-	77	-28,0%
Sulawesi										
Provinsi	Perubahan Kasus Baru dalam 7 Hari Terakhir				Kematian Baru 7 Hari Terakhir		Perubahan Kematian Baru dalam 7 Hari Terakhir			
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen		
Sulawesi Utara	372	15,5%	-	301	-44,7%	18	14,6%	-	7	-28,0%
Sulawesi Tengah	783	32,6%	-	574	-42,3%	49	39,8%	-	24	-32,9%
Sulawesi Selatan	917	38,2%	-	476	-34,2%	44	35,8%	-	22	-33,3%
Sulawesi Tenggara	94	3,9%	-	48	-33,8%	3	2,4%	-	23	-88,5%
Gorontalo	104	4,3%	-	101	-49,3%	4	3,3%	-	12	-75,0%
Sulawesi Barat	130	5,4%	-	56	-30,1%	5	4,1%	-	12	-70,6%
SULAWESI	2.400	100,0%	-	1.556	-39,3%	123	100,0%	-	100	-44,8%
Nusatenggara-Maluku-Papua										
Provinsi	Perubahan Kasus Baru dalam 7 Hari Terakhir				Kematian Baru 7 Hari Terakhir		Perubahan Kematian Baru dalam 7 Hari Terakhir			
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen		
Nusa Tenggara Barat	396	25,1%	-	132	-25,0%	21	21,9%	-	5	-19,2%
Nusa Tenggara Timur	764	48,5%	-	345	-31,1%	18	18,8%	-	16	-47,1%
Maluku	38	2,4%	-	19	-33,3%	1	1,0%	-	2	-66,7%
Maluku Utara	38	2,4%	-	9	-19,1%	1	1,0%	-	1	-50,0%
Papua Barat	70	4,4%	-	173	-71,2%	2	2,1%	-	2	200,0%
Papua	270	17,1%	-	215	-44,3%	53	55,2%	-	44	488,9%
NUSATENGGA-MALUKU-PAPUA	1.576	100,0%	-	893	-36,2%	96	100,0%	-	22	29,7%

World Digital Competitiveness Ranking

2021	Country	2020	Ranking Change	
1	Switzerland	3	2	↑
2	Sweden	6	4	↑
3	Denmark	2	-1	↓
4	Netherlands	4	-	-
5	Singapore	1	-4	↓
6	Norway	7	1	↑
7	Hong Kong SAR	5	-2	↓
8	Taiwan, China	11	3	↑
9	UAE	9	-	-
10	USA	10	-	-
11	Finland	13	2	↑
12	Luxembourg	15	3	↑
13	Ireland	12	-1	↓
14	Canada	8	-6	↓
15	Germany	17	2	↑
16	China	20	4	↑
17	Qatar	14	-3	↓
18	United Kingdom	19	1	↑
19	Austria	16	-3	↓
20	New Zealand	22	2	↑
21	Iceland	21	-	-
22	Australia	18	-4	↓
23	Korea Rep.	23	-	-
24	Belgium	25	1	↑

2021	Country	2020	Ranking Change	
25	Malaysia	27	2	↑
26	Estonia	28	2	↑
27	Israel	26	-1	↓
28	Thailand	29	1	↑
29	France	32	3	↑
30	Lithuania	31	1	↑
31	Japan	34	3	↑
32	Saudi Arabia	24	-8	↓
33	Cyprus	30	-3	↓
34	Czech Republic	33	-1	↓
35	Kazakhstan	42	7	↑
36	Portugal	37	1	↑
37	Indonesia	40	3	↑
38	Latvia	41	3	↑
39	Spain	36	-3	↓
40	Slovenia	35	-5	↓
41	Italy	44	3	↑
42	Hungary	47	5	↑
43	India	43	-	-
44	Chile	38	-6	↓
45	Russia	50	5	↑
46	Greece	49	3	↑
47	Poland	39	-8	↓
48	Romania	51	3	↑
49	Jordan	58	9	↑
50	Slovak Republic	57	7	↑
51	Turkey	46	-5	↓
52	Philippines	45	-7	↓
53	Bulgaria	48	-5	↓
54	Ukraine	55	1	↑
55	Mexico	53	-2	↓
56	Colombia	54	-2	↓
57	Brazil	56	-1	↓
58	Peru	52	-6	↓
59	Croatia	60	1	↑
60	Mongolia	61	1	↑
61	Botswana	NEW		
62	South Africa	59	-3	↓
63	Argentina	62	-1	↓
64	Venezuela	63	-1	↓ Eta

Sumber: IMD-WDCR¹²

¹² <https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/>